



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kevin Eka Pebrianto bin Panijan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir CPU, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, RT. 004, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Alfa Serhernando binti Jarianto, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, RT. 004, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2016 Para Pemohon melangsungkan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang di laksanakan di rumah kediaman Pak H. M. Huda selaku Penghulu dari Pemohon di Jalan Soekarno Hatta, RT. 000, RW. 000, Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan penghulu bernama H. M. Huda;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pernikahan dilangsungkan dengan Penghulu bernama H. M. Huda, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama Ahmad Dalan dan Hamka dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat Kartu Keluarga para Pemohon, Akta Lahir Anak, serta Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2016 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang di laksanakan di rumah Pak H. M. Huda selaku Penghulu dari Pemohon di Jalan Soekarno Hatta, RT. 000, RW. 000, Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Kevin Eka Pebrianto bin Panijan) dan Pemohon II (Alfa Serhernando binti Jarianto), pada tanggal 25 Januari 2016 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang di laksanakan di rumah Pak H. M. Huda selaku Penghulu dari Pemohon di Jalan Soekarno Hatta, RT. 000, RW. 000, Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan mampu untuk membayar biaya perkara, namun selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan memohon Pemeriksaan secara prodeo dan telah disetujui sehingga memohon dalam petitumnya untuk membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2021;
2. Bahwa dalam posita nomor 2 (dua) terdapat penambahan, yaitu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurianto;
3. Bahwa terdapat perubahan dalam posita nomor 2, yaitu saksi nikah para Pemohon bukan Ahmad Dahlan dengan Hamka, melainkan dua orang yang bernama Muhammad dengan Hamka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 350502102940002 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 13 Agustus 2020 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3505056905940002 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, pada tanggal 13 Agustus 2020 bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Supriyanto Bin Sukarni**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Serabutan), bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT. 13/RW. 06, Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena mendengar cerita dari ayah sambung Pemohon II bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2016, namun saksi tidak ingat tanggal persisnya;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman penghulu setemat di Desa Pulau sari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi mendengar cerita yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarianto yang berwakil kepada penghulu setempat bernama H.M. Huda dengan saksi pernikahan Para Pemohon adalah 2 orang saksi yang bernama Muhammad dan seorang lagi bernama Hamka;
 - Bahwa saksi mendengar cerita mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp.150.000,- yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai selama menikah;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan karena ketidak tahuan para Pemohon dan wali nikahnya mengenai administrasi perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kasongan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk membuat Buku Nikah, KTP, serta Kartu Keluarga,;
2. **Ahmad Dahlan bin Yatno**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km. 25, RT. 004, RW. 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ayah sambung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena saksi mendapat kabar langsung melalui telepon dari ayah kandung Pemohon II bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2016;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman penghulu setemat di Desa Pulau sari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Jarianto yang berwakil kepada penghulu setempat bernama H.M. Huda dengan saksi pernikahan Para

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Pemohon adalah 2 orang saksi yang bernama Muhammad dan seorang lagi bernama Hamka;

- Bahwa saksi mendengar cerita mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp.150.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai selama menikah;
- Bahwa setahu saksi perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan karena ketidak tahuan para Pemohon dan wali nikahnya mengenai administrasi perkawinan;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kasongan adalah untuk mengesahkan pernikahannya dan untuk membuat Buku Nikah, KTP, serta Kartu Keluarga,;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1. dan P.2 (Fotokopi Kartu Tnada Penduduk Elektronik para Pemohon), masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir RT.004 RW. 000, Kabupaten Katingan, maka harus dinyatakan menurut hukum para Pemohon saat ini berada dalam lingkup pencatatan perkawinan dalam kewenangan KUA Kecamatan Katingan Hilir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Supriyanto Bin Sukarni (Saksi I), dan 2) Slamet Bin Sarino (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Januari 2016 di rumah kediaman Pak H. M. Huda selaku Penghulu Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, dengan penghulu bernama H. M. Huda;
- Bahwa saat akad nikah, wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jarianto yang telah *aqil baligh* dan beragama Islam, kemudian mewakili proses ijab kepada Penghulu Nikah bernama H.M Huda, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama Muhammad, dan Hamka, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.150.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA karena Ketidaktahuan mengenai administrasi perkawinan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukaan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتي يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang kenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



lantaran ketidaktahuan para Pemohon mengenai administrasi perkawinan. Keadaan yang melatarbelakangi tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon ini, tidaklah mengandung tendensi melawan undang-undang negara. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelakanginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ وَيُخَفِّفَ عَنْكُمُ رِيشَ الْغَنَاسِ ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara diajukan secara prodeo sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan para Pemohon telah dibebaskan dari biaya perkara sesuai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W16-A10/436/HK.05/V/2021

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kasongan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2021 yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kevin Eka Pebrianto bin Panijan**) dengan Pemohon II (**Alfa Serhernando binti Jariato**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kasongan Tahun 2021 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh NORHADI, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I.

NORHADI, S.H.I, M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2021/PA.Ksn